

KEARIFAN LOKAL DAN AKUNTABILITAS SOSIAL: STUDI FENOMENOLOGIS TERHADAP NILAI MAJA LABO DAHU DALAM PRAKTEK EKONOMI KOLEKTIF MASYARAKAT BIMA

Hariatih^{1*}, Darwis Said², Ratna Ayu Damayanti³

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia

^{2, 3} Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin

¹hariatih@nobel.ac.id, ²darwissaid@fe.unhas.ac.id, ³damayantiss@yahoo.co.id

Abstract, *This research aims to explore the meaning of the Maja Labo Dahu value in the social and economic life of the Bima community, as well as its role in shaping social accountability practices and community-based reporting systems. The approach used is qualitative with a hermeneutic phenomenological method, through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The results showed that the value of Maja Labo Dahu, which emphasizes shame and fear, has been internalized as a social norm that encourages honesty, integrity and collective responsibility. Accountability practices in the community emphasize social mechanisms such as deliberation and moral supervision over formal reporting. This value serves as an effective internal control and shapes substantive accountability that is contextual and ethically meaningful. These findings reinforce the urgency of developing contextual accounting that integrates local cultural values in community reporting systems.*

Keywords: *Maja Labo Dahu, Social Accountability, Contextual Accounting, Phenomenology, Local Values.*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna nilai Maja Labo Dahu dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bima, serta perannya dalam membentuk praktik akuntabilitas sosial dan sistem pelaporan berbasis komunitas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologis hermeneutik, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Maja Labo Dahu yang menekankan rasa malu dan takut, telah terinternalisasi sebagai norma sosial yang mendorong kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kolektif. Praktik akuntabilitas di komunitas lebih menekankan mekanisme sosial seperti musyawarah dan pengawasan moral daripada pelaporan formal. Nilai ini berfungsi sebagai kontrol internal yang efektif dan membentuk akuntabilitas substantif yang kontekstual dan bermakna secara etis. Temuan ini menguatkan urgensi pengembangan akuntansi kontekstual yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pelaporan komunitas.

Kata Kunci: *Maja Labo Dahu, Akuntabilitas Sosial, Akuntansi Kontekstual, Fenomenologi, Nilai Lokal.*

*Koresponden

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi komunitas, Maja Labo Dahu tidak sekadar menjadi simbol moralitas personal, tetapi berkembang menjadi fondasi etik kolektif yang menopang sistem sosial berbasis akuntabilitas dan solidaritas. Dalam sistem kehidupannya, masyarakat Bima menghidupi suatu sistem yaitu nilai yang bersumber dari ajaran Islam dan terinternalisasi dalam perilaku sosial, politik, dan budaya sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi panduan moral individual, tetapi juga membentuk kerangka normatif kolektif yang mewarnai seluruh struktur masyarakat. Salah satu manifestasi utama dari nilai Islam dalam budaya Bima adalah falsafah hidup yang dikenal dengan ungkapan Maja Labo Dahu, yang secara harfiah berarti “malu dan takut”. Ungkapan ini bukan sekadar semboyan, melainkan menjadi inti dari etos sosial yang mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan (maja) dan memiliki kesadaran spiritual akan akibat moral dan hukum dari setiap tindakan (labo dahu) (Hamid, 2016).

Nilai ini mengandung dimensi kesadaran akan akibat sosial dari perilaku menyimpang, dalam kombinasi pemaknaan Maja labu Dahu bukan hanya malu tertuju moralitas yaitu rusaknya kepercayaan publik serta takut kepada Tuhan. Dalam masyarakat tradisional Bima, rasa takut melakukan kesalahan menjadi bentuk kontrol sosial yang kuat, menggantikan peran sistem hukum formal dalam mengatur relasi ekonomi (Usman, 2020). Oleh karena itu, Maja Labo Dahu berfungsi sebagai mekanisme informal namun efektif yang menjaga keteraturan, keadilan, dan keberlanjutan dalam praktik ekonomi kolektif (Hamid, 2016).

Nilai ini termanifestasi dalam berbagai aktivitas ekonomi komunal seperti pertanian bersama (nggampo), pembagian hasil panen secara adil, pengelolaan air irigasi, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan atau laut. Dalam aktivitas tersebut, pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keadilan tidak memerlukan sanksi legal formal, karena pelaku akan menghadapi sanksi sosial berupa kehilangan muka, rasa malu, dan pengucilan komunitas yang dalam budaya Bima merupakan bentuk hukuman yang berat. Sistem ini menunjukkan bahwa Maja Labo Dahu tidak hanya berperan dalam dimensi spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tata ekonomi lokal yang etis, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Azra, 2002).

Konsep ini sejalan dengan pemikiran Elinor Ostrom (1990) mengenai common-pool resources, yang menyatakan bahwa komunitas yang memiliki nilai kolektif dan norma internal yang kuat mampu mengelola sumber daya bersama secara lestari tanpa ketergantungan pada pengawasan eksternal lebih pada transparansi dan akuntabilitas. Maja Labo Dahu menjadi landasan nilai yang memperkuat prinsip-prinsip seperti kepercayaan (trust), kewajiban timbal balik (reciprocal obligation), dan penegakan moral (moral enforcement), yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan ekonomi komunitas (Geertz, 1960).

Dengan demikian, diperlukan upaya rekonstruksi terhadap konsep akuntabilitas yang selama ini bersifat formalistik agar lebih kontekstual, dengan menjadikan nilai-nilai lokal seperti Maja Labo Dahu sebagai basis moral dan sosial dalam sistem akuntansi komunitas. Dalam konteks praktik akuntansi, transparansi dan pertanggungjawaban tidak semestinya dibatasi oleh format laporan keuangan formal semata, tetapi juga perlu dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dan mengikat dalam komunitas.

Maja Labo Dahu, sebagai etika lokal masyarakat Bima yang menekankan rasa malu dan takut atas tindakan tidak jujur, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat internal dan kolektif.

Nilai-nilai lokal seperti ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi tidak harus selalu dibangun di atas asas rasionalitas individualistik sebagaimana dalam paradigma ekonomi neoklasik, yang menitikberatkan efisiensi, objektivitas, dan logika pasar. Sebaliknya, akuntansi dapat dikembangkan dalam kerangka etika kolektif dan relasi sosial, di mana pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki makna substantif karena bertumpu pada kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab moral.

Dalam kerangka ini, Maja Labo Dahu tidak hanya penting untuk pelestarian budaya lokal, tetapi juga relevan sebagai inspirasi dalam merancang sistem akuntansi komunitas yang lebih inklusif, partisipatif, dan berakar pada realitas sosial masyarakat. Nilai ini berpotensi menjadi landasan dalam pengembangan akuntansi kontekstual, yakni sistem pelaporan yang tidak hanya teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial, keberlanjutan komunitas, dan martabat manusia (Hamid, 2016; Usman, 2020)

Dalam praktik akuntansi modern, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban organisasi umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip formal yang rasional, objektif, dan berbasis aturan universal, sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan nasional maupun internasional. Pendekatan ini lahir dari tradisi positivistik yang menekankan kuantifikasi, netralitas, dan keterbandingan informasi untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, khususnya investor, kreditor, dan regulator. Namun, model pelaporan yang terlalu mengandalkan kerangka teknokratis ini sering kali abai terhadap dimensi etika, relasional, dan sosial-budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat lokal (Cooper & Morgan, 2008).

Dalam konteks ini, pendekatan formalistik cenderung tidak mampu menjangkau kompleksitas makna yang tersemat dalam praktik ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai komunal. Di daerah-daerah yang masih menghidupi sistem nilai tradisional yang kuat seperti Bima, Nusa Tenggara Barat, praktik pertanggungjawaban sosial tidak semata-mata dimediasi melalui angka atau laporan tahunan, tetapi melalui sistem nilai budaya yang hidup dan terus direproduksi dalam interaksi sosial. Salah satu nilai utama tersebut adalah Maja Labo Dahu, yang menanamkan etika rasa malu dan takut dalam bertindak, sehingga setiap tindakan ekonomi dan sosial mengandung tanggung jawab moral yang tinggi, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan (Hamid, 2016; Usman, 2020).

Ketiadaan ruang bagi nilai-nilai lokal semacam ini dalam kerangka pelaporan keuangan konvensional mengindikasikan adanya keterputusan antara sistem akuntansi modern dan realitas sosial tempat ia diterapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang relevansi sosial akuntansi, sebagaimana dikemukakan dalam literatur akuntansi kritis (Tinker, 1985; Laughlin, 1987), yaitu: untuk siapa akuntansi disusun, dan nilai-nilai siapa yang direpresentasikan? Ketika pelaporan tidak mencerminkan nilai dan logika lokal, maka akuntabilitas yang dibangun menjadi semu, karena tidak menyentuh basis etis yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pelaporan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap keberagaman budaya. Akuntansi perlu diperkaya dengan perspektif interpretif dan kritis yang mampu menangkap makna lokal dalam praktik pertanggungjawaban. Dalam konteks Bima,

integrasi nilai Maja Labo Dahu ke dalam pelaporan sosial-organisasi dapat menjadi model alternatif akuntabilitas berbasis kultural, yang tidak hanya melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan bagaimana suatu tindakan dipertanggungjawabkan secara moral dalam komunitas (Mulawarman, 2011). Pendekatan ini penting untuk membangun sistem pelaporan yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan bermakna secara kultural.

Fenomena yang menarik muncul ketika prinsip Maja Labo Dahu mulai meresap ke dalam ruang-ruang praktik ekonomi lokal. Nilai yang semula identik dengan etika personal dan sosial kini menjelma menjadi panduan moral dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pencatatan keuangan usaha skala kecil, pembagian hasil secara kolektif, hingga pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Dalam konteks masyarakat adat Bima, praktik ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada logika untung-rugi atau kepatuhan terhadap regulasi formal, melainkan juga pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keseimbangan sosial (Hamid, 2016; Usman, 2020).

Dalam banyak komunitas, akuntabilitas ditafsirkan bukan hanya sebagai kewajiban administratif yang bersifat teknis, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral yang mengakar pada relasi antarindividu. Kejujuran bukan sekadar standar prosedural, melainkan menjadi kehormatan pribadi yang harus dijaga. Pelanggaran terhadap norma seperti menyembunyikan keuntungan, mengurangi bagian orang lain, atau tidak mencatat transaksi dengan benar dianggap sebagai perbuatan yang memalukan dan mencederai kepercayaan kolektif. Dalam pandangan masyarakat, "malu jika tidak jujur" dan "takut menyakiti orang lain" bukan hanya semboyan, tetapi prinsip etis yang mengatur tindakan ekonomi sehari-hari, bahkan lebih kuat pengaruhnya daripada sanksi hukum formal (Azra, 2002; MacIntyre, 1984).

Nilai Maja Labo Dahu dalam praktik ekonomi semacam ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat preventif dan menyeluruh. Ketika seseorang merasa malu karena bersikap curang, atau takut mengkhianati kepercayaan komunitas, maka muncul pengawasan dari dalam diri, yang oleh Gray et al. (1996) disebut sebagai internal moral accountability. Akuntabilitas tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi dari kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai komunitas yang hidup dan disepakati bersama. Hal ini menciptakan sistem ekonomi yang relatif stabil, adil, dan tahan terhadap konflik, karena dijalankan atas dasar saling percaya dan etika komunal, bukan semata regulasi tertulis. Dengan demikian, nilai-nilai lokal seperti Maja Labo Dahu memberikan kontribusi penting dalam memperluas makna akuntabilitas—dari sekadar tanggung jawab administratif menuju tanggung jawab moral yang kontekstual dan berakar pada budaya masyarakat (Mulawarman, 2011; Laughlin, 1987).

Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak dapat semata-mata dipahami sebagai alat teknis yang netral untuk mencatat dan melaporkan transaksi ekonomi. Lebih dari itu, akuntansi juga merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, sistem nilai, dan relasi sosial di mana ia dijalankan. Dalam konteks masyarakat lokal seperti Bima, akuntansi berperan bukan hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai sistem moral yang merefleksikan etika komunitas. Dengan memahami Maja Labo Dahu—nilai luhur yang menekankan rasa malu dan takut dalam berbuat tidak adil—dalam kerangka praktik akuntansi, kita dapat membuka ruang

konseptual baru bagi akuntansi yang lebih kontekstual, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang fungsi sosial akuntansi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem pelaporan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan secara sosial (Gray et al., 1996; Mulawarman, 2011).

TINJAUAN LITERATUR

Akuntabilitas Sosial dalam Perspektif Komunitas

Akuntabilitas sosial merujuk pada mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya formal dan administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral, relasional, dan kultural. Gray et al. (1996) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang melampaui pelaporan finansial, yaitu bagaimana suatu entitas bertanggung jawab kepada komunitas melalui nilai, tindakan, dan dampak sosial. Dalam komunitas tradisional, seperti masyarakat Bima, akuntabilitas sering kali bersifat informal, namun sangat efektif karena dibangun atas dasar kepercayaan dan norma sosial bersama (Mulawarman, 2011). Pendekatan ini bertentangan dengan logika teknokratis sistem pelaporan konvensional yang cenderung menekankan kepatuhan terhadap standar dan regulasi

Nilai Maja Etika Lokal dalam Praksis Sosial

Labo Dahu, secara harfiah berarti “malu dan takut”, namun dalam konteks budaya masyarakat Bima, ia memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Nilai ini merupakan bentuk etika lokal yang terinternalisasi secara kolektif dan membentuk kesadaran moral masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Djanggih (2019) menegaskan bahwa Maja Labo Dahu merupakan manifestasi dari tanggung jawab spiritual kepada Tuhan, tanggung jawab sosial kepada komunitas, dan tanggung jawab moral kepada diri sendiri. Ia tidak hanya menjadi norma etis, tetapi berfungsi sebagai fondasi yang mengarahkan tindakan dan keputusan individu dalam masyarakat.

Dalam praktik ekonomi, Maja Labo Dahu bertindak sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat informal namun sangat efektif. Berbeda dengan sistem hukum atau regulasi tertulis yang bersandar pada sanksi formal, nilai ini mengandalkan kekuatan batiniah: rasa malu jika bersalah dan rasa takut atas konsekuensi sosial dari perilaku menyimpang. Ketika seseorang gagal mempertanggungjawabkan dana kelompok, menggelapkan hasil panen bersama, atau melanggar kesepakatan komunitas, tindakan tersebut tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang memalukan dan merusak kehormatan pribadi maupun keluarga.

Nilai Maja Labo Dahu dengan demikian menginternalisasi sikap integritas dan kejujuran sebagai bagian dari identitas kolektif. Ia mendorong terbentuknya sistem pengawasan sosial yang tidak bergantung pada instrumen eksternal, melainkan tumbuh dari kesadaran internal masyarakat sendiri. Dalam kerangka ini, Maja Labo Dahu bukan hanya norma budaya, tetapi juga instrumen etika yang bekerja aktif dalam membentuk perilaku akuntabel, terutama dalam konteks ekonomi kolektif seperti pengelolaan sumber daya bersama, dana arisan, pertanian kelompok, dan koperasi lokal.

Lebih jauh, nilai ini mencerminkan konsep *moral enforcement* sebagaimana dikemukakan oleh Ostrom (1990), bahwa komunitas tradisional mampu menciptakan sistem kepatuhan dan pertanggungjawaban berbasis nilai bersama. Bagi masyarakat Bima, menjaga kepercayaan sosial adalah prioritas, dan pelanggaran terhadapnya tidak hanya merusak hubungan interpersonal, tetapi juga mencederai struktur sosial yang telah dibangun secara turun-temurun. Dengan demikian, Maja Labo Dahu tidak hanya relevan sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menciptakan sistem akuntabilitas sosial yang berkelanjutan, yang menjembatani antara etika lokal dan praktik ekonomi sehari-hari.

Akuntabilitas Sosial dalam Perspektif Akuntansi

Dalam konteks ini, akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban perlu direfleksikan kembali agar tidak semata-mata berbasis pada prinsip formalisme dan teknokrasi. Perlu ada ruang bagi nilai-nilai akuntabilitas sosial merupakan konsep yang menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak semata-mata ditujukan kepada otoritas

formal seperti negara, lembaga keuangan, atau otoritas hukum, melainkan juga kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam kehidupan kolektif. Dalam kerangka ini, akuntabilitas tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif yang diatur oleh standar dan regulasi, tetapi juga sebagai bentuk relasi sosial yang sarat dengan nilai, norma, dan harapan moral. Roberts (1991) menekankan bahwa akuntabilitas sejati bersifat interpersonal dan relasional—yakni, ketika pelaporan dan pertanggungjawaban terjadi dalam hubungan sosial yang didasari rasa saling percaya, kejujuran, dan komitmen terhadap kebaikan bersama.

Dalam masyarakat adat, khususnya di komunitas-komunitas yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, bentuk akuntabilitas seperti ini menjadi realitas yang hidup dan dinamis. Pertanggungjawaban tidak selalu diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan tertulis atau penyampaian dokumen formal, tetapi lebih sering diekspresikan melalui mekanisme sosial seperti musyawarah terbuka, penyampaian lisan di forum komunitas, atau pengawasan moral yang berbasis nilai dan kebiasaan. Wibowo (2017) menyebut praktik ini sebagai bentuk *akuntabilitas substantif*, yaitu pertanggungjawaban yang berfokus pada makna, ketulusan, dan pengaruh sosial dari tindakan, bukan sekadar kelengkapan administratif atau format pelaporan.

Akuntabilitas substantif ini menempatkan relasi antarmanusia sebagai fondasi utama dari proses pertanggungjawaban. Di dalamnya, transparansi bukan diukur dari seberapa banyak dokumen yang disajikan, tetapi dari kejelasan niat, kesesuaian tindakan dengan nilai komunitas, serta kemauan untuk membuka diri terhadap evaluasi dan kritik sosial. Dalam banyak komunitas adat, pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, atau solidaritas bukan hanya dianggap kesalahan teknis, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang dapat merusak reputasi, kepercayaan, bahkan posisi sosial seseorang dalam komunitas lokal, ekspresi sosial, dan mekanisme informal yang justru memiliki kekuatan pengawasan moral yang lebih kuat dan kontekstual. Oleh karena itu, mengakui bentuk-bentuk akuntabilitas sosial berbasis budaya bukan hanya merupakan penghormatan terhadap keberagaman, tetapi juga bagian dari pengembangan sistem akuntansi yang lebih etis, manusiawi, dan relevan dengan kenyataan sosial.

Akuntabilitas Sosial dalam Perspektif Akuntansi dan Nilai Labo Dahu

Akuntabilitas sosial merupakan konsep pertanggungjawaban yang melampaui kewajiban formal kepada lembaga atau otoritas, dan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang berhak menerima dan menilai pertanggungjawaban atas tindakan kolektif. Dalam pemikiran Roberts (1991), akuntabilitas yang sejati terjadi dalam ruang relasional yakni ketika pertanggungjawaban tidak bersifat satu arah dan administratif, tetapi terbentuk dari hubungan sosial yang memuat unsur kepercayaan, rasa hormat, dan nilai-nilai moral bersama. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar prosedur, tetapi juga praktik sosial yang bermakna secara etis dan kultural.

Dalam praktiknya, masyarakat adat seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat, telah lama mempraktikkan bentuk akuntabilitas sosial berbasis nilai-nilai lokal. Salah satunya adalah Maja Labo Dahu, nilai budaya yang menanamkan rasa malu untuk berlaku curang dan rasa takut akan konsekuensi moral dari tindakan yang tidak adil. Dalam konteks ini, pelaporan keuangan atau penggunaan dana kelompok tidak semata-mata dipertanggungjawabkan dalam format laporan tertulis, tetapi melalui mekanisme sosial seperti musyawarah kampung, forum adat, atau penyampaian terbuka di hadapan anggota komunitas. Proses ini menekankan nilai transparansi substantif, di mana yang dinilai bukan hanya isi laporan, tetapi ketulusan dan integritas dari si pelapor (Hamid, 2016; Usman, 2020).

Wibowo (2017) menyebut bentuk ini sebagai *akuntabilitas substantif*, yakni pertanggungjawaban yang menekankan pada makna dan tanggung jawab moral, bukan sekadar bentuk formal. Dalam masyarakat Bima, jika seseorang menyalahgunakan dana kolektif, dampaknya bukan hanya administratif melainkan sosial dan moral. Ia bisa kehilangan kepercayaan komunitas, dikenai sanksi sosial, bahkan merasa aib secara pribadi karena melanggar nilai *Maja Labo Dahu*. Dengan demikian, nilai ini berperan sebagai sistem etika internal yang memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dari dalam diri masyarakat itu sendiri.

Pengalaman masyarakat Bima memperlihatkan bahwa sistem akuntabilitas yang tumbuh dari akar budaya lokal dapat lebih kuat dan relevan dibandingkan sistem

pelaporan modern yang berjarak dengan nilai sosial komunitas. Hal ini mempertegas pandangan Cooper dan Morgan (2008) bahwa akuntansi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai praktik teknis, melainkan juga sebagai praktik sosial yang perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan nilai lokal. Mengintegrasikan nilai-nilai seperti Maja Labo Dahu ke dalam kerangka akuntabilitas dapat memperluas makna akuntansi menjadi lebih manusiawi, bermoral, dan mampu menjawab kebutuhan komunitas secara nyata.

Akuntansi sebagai Sistem Sosial dan Budaya

Akuntansi bukanlah praktik teknis yang sepenuhnya netral dan bebas nilai. Ia selalu hadir dalam konteks sosial, budaya, politik, dan historis tertentu yang membentuk serta dipengaruhi secara timbal balik. Burchell et al. (1980) telah lama menggarisbawahi bahwa praktik akuntansi tidak hanya mencerminkan realitas ekonomi, tetapi juga membentuk dan mengarahkan bagaimana realitas tersebut dipahami dan dikelola. Dalam pendekatan kritis dan interpretif, akuntansi dipandang sebagai bagian dari konstruksi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari struktur nilai, relasi kekuasaan, dan simbol budaya tempat ia diterapkan. Oleh karena itu, pelaporan keuangan, sistem pengendalian, dan proses pertanggungjawaban seharusnya tidak dianggap sebagai proses universal dan objektif, melainkan sebagai ekspresi dari logika sosial yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu.

Dalam konteks ini, sejumlah pemikir seperti Triyuwono (2006) dan Kamayanti (2016) menyerukan perlunya rekonstruksi paradigma akuntansi yang lebih manusiawi, spiritual, dan berakar pada budaya lokal. Mereka mengkritik dominasi paradigma positivistik dalam akuntansi konvensional yang mengutamakan efisiensi dan kuantifikasi, namun kerap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan etika komunitas. Akuntansi, dalam pandangan mereka, harus dibuka sebagai ruang reflektif yang memungkinkan munculnya alternatif-alternatif yang berlandaskan spiritualitas, nilai luhur, dan kearifan lokal.

Dalam konteks masyarakat Bima, integrasi nilai Maja Labo Dahu ke dalam praktik akuntansi bukan hanya menjadi upaya pelestarian budaya, tetapi juga merupakan langkah etis untuk menciptakan sistem pelaporan dan pengendalian yang lebih kontekstual dan bermakna. Nilai *Maja Labo Dahu*, yang menekankan rasa malu terhadap perbuatan tidak jujur dan rasa takut atas konsekuensi moral dan sosial dapat menjadi fondasi etik yang memperkuat praktik pertanggungjawaban dalam komunitas. Integrasi nilai ini mampu memperkuat legitimasi sosial, menumbuhkan kepercayaan antaranggota komunitas, dan memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan.

Dengan kata lain, ketika akuntansi membuka diri terhadap nilai-nilai lokal seperti Maja Labo Dahu, ia tidak hanya bertransformasi menjadi alat pelaporan, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter dan tatanan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi dapat berkembang menjadi sistem sosial yang responsif terhadap konteks budaya dan spiritual masyarakat, bukan sekadar sistem administratif yang mengabdikan pada logika kapitalisme modern.

Kebutuhan akan Akuntansi Kontekstual

Akuntansi kontekstual merupakan pendekatan yang menempatkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kerangka sosial-budaya tempat ia diterapkan. Pendekatan ini menolak anggapan bahwa akuntansi bersifat universal dan netral, serta mengusulkan bahwa praktik pelaporan seharusnya disesuaikan dengan realitas sosial, nilai, dan norma yang hidup dalam masyarakat lokal. Taufik (2022) menegaskan bahwa dalam komunitas-komunitas tradisional, sistem pelaporan keuangan sebaiknya tidak hanya mengikuti prinsip formalis yang bersumber dari standar internasional, melainkan juga harus merefleksikan nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab sosial, dan harmoni komunal. Dengan kata lain, akuntansi yang kontekstual adalah akuntansi yang sensitif terhadap nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.

Dalam kerangka tersebut, memahami praktik ekonomi kolektif masyarakat Bima melalui lensa nilai Maja Labo Dahu menjadi sangat relevan. Nilai ini tidak hanya menjadi pedoman etika individual, tetapi juga membentuk struktur sosial yang mengatur bagaimana kepercayaan dibangun, bagaimana hasil ekonomi dibagi, dan bagaimana tanggung jawab sosial ditegakkan. Melalui perspektif ini, akuntansi tidak lagi diposisikan

semata sebagai alat teknis untuk mencatat dan melaporkan transaksi, tetapi sebagai instrumen sosial dan moral yang menjembatani antara tuntutan pelaporan dan praktik nilai komunitas. Dalam komunitas Bima, misalnya, keberhasilan seseorang dalam mengelola dana kelompok tidak hanya diukur dari kelengkapan laporan keuangannya, tetapi dari kejujuran, integritas, dan kesediaannya untuk membuka diri di hadapan komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi hermeneutik guna memahami pengalaman subjektif individu dalam konteks budaya lokal. Tujuan utama pendekatan ini adalah menggali makna yang dihayati masyarakat terhadap nilai-nilai seperti Maja Labo Dahu yang berfungsi sebagai panduan moral serta dasar dari akuntabilitas sosial. Sesuai dengan pandangan Van Manen (1990), fenomenologi tidak hanya menguraikan pengalaman, melainkan juga menafsirkan makna terdalam dari pengalaman tersebut. Nilai budaya Maja Labo Dahu diposisikan bukan sebagai entitas terukur, melainkan sebagai fenomena yang dipahami melalui kisah hidup, praktik sosial, dan refleksi komunitas.

Wilayah penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di Bima, Nusa Tenggara Barat, terutama di komunitas adat yang masih menjalankan praktik ekonomi berbasis nilai lokal. Beberapa kegiatan kolektif yang menjadi fokus termasuk pertanian bersama (nggampo), arisan kampung, koperasi lokal, dan usaha komunitas. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keterkaitannya dengan penghayatan nilai budaya yang terintegrasi dalam praktik ekonomi serta tanggung jawab sosial komunitas.

Partisipan penelitian adalah individu yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi kolektif, seperti tokoh adat, pengurus kelompok ekonomi, serta masyarakat yang pernah mengelola atau menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban dana kolektif. Pemilihan subjek dilakukan melalui teknik purposive sampling dan diperluas menggunakan snowball sampling untuk menjangkau partisipan dengan pengalaman relevan. Kriteria seleksi mencakup pengetahuan tentang nilai Maja Labo Dahu dan keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial-ekonomi berbasis komunitas.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan panduan semi-terstruktur dan direkam atas izin partisipan. Observasi dilakukan dalam kegiatan komunitas seperti musyawarah atau distribusi hasil panen, guna menangkap konteks sosial secara langsung. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen informal dan artefak budaya yang memperlihatkan praktik pertanggungjawaban. Creswell (2013) menyatakan bahwa kombinasi teknik ini memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan metode fenomenologi hermeneutik Van Manen yang mencakup eksplorasi pengalaman hidup, identifikasi tema, penulisan interpretatif, serta konfirmasi makna melalui member checking. Proses analisis bersifat siklis dan reflektif untuk menggali dimensi moral dan kultural dari akuntabilitas berbasis Maja Labo Dahu. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, member checking, audit trail, dan reflektivitas peneliti, sebagaimana disarankan oleh Lincoln dan Guba (1985). Pendekatan ini memastikan integritas dan kredibilitas temuan dalam kerangka interpretatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Nilai Maja Labo Dahu dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Bima

Makna nilai *Maja Labo Dahu* dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bima mencerminkan prinsip moral kolektif yang membimbing perilaku individu dalam interaksi sehari-hari. Dalam aspek sosial, nilai ini mendorong warga untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga melalui sikap jujur, saling menghormati, dan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab sosial. Makna kalimat *maja labo dahu*, sebagaimana diungkapkan oleh Nurfarhati adalah sebagai berikut:

“bahwa nilai Maja Labo Dahu, yang secara harfiah berarti "malu dan takut", kalimat tersebut dipahami sebagai prinsip moral tertinggi yang menuntun perilaku sosial dalam masyarakat Bima. Malu dalam konteks ini bermakna menjaga kehormatan pribadi dan komunitas, sedangkan takut merujuk pada

kesadaran spiritual akan akibat moral maupun hukum dari perbuatan yang melanggar nilai sosial.”

Lebih lanjut, menurut Nurfarhati

“ bahwa Nilai Maja Labo Dahu ini diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Bima sejak dini melalui pendidikan informal keluarga, pengajian, serta interaksi sosial keseharian. Para orang tua menanamkan prinsip maja labo dahu sebagai pedoman berperilaku, tidak hanya dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dalam kaitannya dengan Tuhan dan alam. Nilai ini bukan hanya dijalani secara individual, melainkan dihayati secara kolektif sebagai bagian dari identitas budaya dan sistem nilai masyarakat.”

Manusia yang beriman harus memiliki takwa yang berkualitas. Mereka harus memegang teguh sifat “Dahu” (takut) terhadap kejahatan, karena takut kepada Allah. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, mereka selalu melaksanakan “Ruku Isla Lima Ori” (rukun islam lima perkara), secara utuh dan kontinyu, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya seperti yang tertera dalam kitab suci al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada dasarnya fungsi dan peranan Maja Labo Dahu, pada masyarakat Bima adalah untuk menumbuhkan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, agar dapat melakukan tugasnya sebagai Khalifah Allah di muka bumi, selalu mendekatkan diri kepada-Nya melalui kegiatan Ubudiah serta Muamalah. Dengan perkataan lain manusia harus mengadakan hubungan Vertikal dan Horizontal, sehingga cita-cita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai (Ilmiawan mubin(2018). Menurut Syarif Ahmad, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

“bahwa makna kata maja (malu) lebih ditikberatkan pada aspek sosiologis. Artinya maja (malu) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku umum. Sementara dahu (takut) lebih bermakna religiulitas, yaitu ketakutan akan hukuman dari Maha Pencipta, yaitu Allah, SWT sebagai sumber dari segala sumber hukum.”

Selanjutnya Syarif Ahmad menjelaskan

“bahwa sumber nilai maja labo dahu diilhami oleh cara pandang hukum adat Bima yang dikenal dengan istilah sara atau disebut sar'i yang bersumber dari kata syariat. Kalimat maja labo dahu menjadi semacam “mantra” yang diwariskan dari generasi ke generasi”.

Dalam konteks ekonomi baik pemerintahan , nilai ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional. Masyarakat bima harusnya merasa malu bila tidak jujur dalam membagi hasil panen atau tidak mencatat penggunaan dana secara benar. Perasaan takut bukan karena sanksi formal, tetapi karena takut kehilangan kepercayaan dan menghadapi pengucilan sosial. Nilai ni membentuk karakter dan kesadaran moral yang kuat dalam interaksi ekonomi sehari-hari. Sementara dalam kehidupan ekonomi, *Maja Labo Dahu* menjadi penggerak etika usaha dan pengelolaan keuangan berbasis amanah, di mana pelanggaran atas kepercayaan dipandang sebagai aib yang mencederai harga diri. Nilai ini juga memperkuat sistem akuntabilitas informal yang berbasis pada pengawasan sosial dan rasa malu, sehingga menjadi fondasi kultural bagi terciptanya integritas, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi komunitas local (ilmiawan mubin 2018)

Peran Nilai Maja Labo Dahu dalam Membentuk Praktik Akuntabilitas Sosial

Peran nilai *Maja Labo Dahu* dalam membentuk praktik akuntabilitas sosial sangat signifikan karena ia berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral dan budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat Bima. Nilai *maja* (malu) mendorong individu untuk menghindari perilaku tidak etis atau menyimpang karena adanya rasa takut mempermalukan diri sendiri dan keluarganya di hadapan komunitas. Sementara *labo dahu* (takut) menanamkan kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di hadapan Tuhan. Dalam Wawancara Dwi Arini Siswani bagaimana Nilai Maja Labo Dahu Dalam Praktik Akuntabilitas sosial menyatakan

“ Ada 3 Aspek yang penting dalam Akuntabilitas dalam Maja Labo Dahu yaitu aspek pengendalian, aspek Etika dan aspek Pertanggung jawaban dikarena aspek tersebut tak dapat dipisahkan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pemaknaan maja labo dahu dalam perspektif akuntansi terbukti berperan penting dalam membentuk sistem akuntabilitas sosial yang bersifat non-formal tetapi sangat efektif. “

Dalam komunitas Bima, bentuk akuntabilitas tidak terbatas pada pelaporan tertulis, tetapi banyak dijalankan melalui musyawarah kampung, forum terbuka, atau penyampaian lisan langsung kepada anggota komunitas.

Ketika seseorang bertanggung jawab mengelola dana kelompok, ia akan menyampaikan laporan secara langsung, dengan disaksikan anggota komunitas. Kesesuaian antara tindakan dan nilai menjadi tolak ukur utama, bukan semata-mata dokumen tertulis. Bila terjadi penyimpangan, masyarakat lebih memilih memberikan sanksi sosial seperti teguran terbuka, rasa malu publik, atau penurunan kepercayaan secara drastis. menurut Dwi arini siswani

“Sistem akuntabilitas yang tidak hanya bersifat formal dan administratif, tetapi juga informal dan substantif—berbasis pada kepercayaan, tanggung jawab, dan pengawasan sosial. Dalam konteks ini, transparansi tidak bergantung pada dokumen tertulis, tetapi pada legitimasi moral dan ikatan nilai yang dibangun antarwarga”

Dalam konteks pelaporan dan pengelolaan keuangan, *Maja* sebagai rasa malu terhadap tindakan menyimpang dan *Labo Dahu* sebagai rasa takut terhadap konsekuensi sosial maupun spiritual, mendorong individu untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab tanpa harus ditekan oleh aturan formal. Sebagaimana ditegaskan oleh Usman (2020), nilai ini merupakan wujud dari etika sosial masyarakat Mbojo yang secara filosofis membentuk struktur moral kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, dalam pengelolaan arisan dan dana kas RT, warga cenderung bersikap terbuka dan disiplin karena takut mempermalukan diri di hadapan komunitas atau menanggung aib sosial. Sistem ini menghasilkan bentuk akuntabilitas substantif yang tidak bergantung pada sistem pelaporan tertulis semata, melainkan bertumpu pada pengawasan sosial yang kuat dan rasa etis yang bersumber dari nilai-nilai lokal.

Penelitian Mubin dkk. (2022) juga menyebut bahwa *Maja Labo Dahu* merupakan konsep etik yang berasal dari masa Kesultanan Bima dan berfungsi sebagai pengendali perilaku sosial yang mencerminkan kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab antarindividu. Nilai ini dikaitkan dengan prinsip *hablum minannas* (hubungan antar manusia) dan *hablum minallah* (hubungan dengan Tuhan), sebagaimana dijelaskan dalam naskah-naskah kesultanan yang dikaji oleh Mbojoklopedia (2021), yang menempatkan *Maja Labo Dahu* bukan sekadar norma adat, melainkan sebagai filosofi hidup yang membentuk tata kelola sosial berbasis etika komunitas. Dengan demikian, keberadaan nilai ini menjadikan praktik akuntabilitas di masyarakat Bima lebih manusiawi, kontekstual, dan bermakna secara budaya, sekaligus memperkuat legitimasi moral atas setiap bentuk tanggung jawab sosial yang dijalankan secara kolektif. Nilai ini membentuk sistem kontrol sosial berbasis internal, di mana rasa malu dan takut berfungsi sebagai pencegah utama tindakan tidak jujur. Hal ini sesuai dengan konsep internal moral accountability (Gray et al., 1996), di mana kontrol muncul dari kesadaran individu terhadap nilai bersama, bukan dari tekanan formal eksternal. Dalam banyak kasus, pelaku yang menyimpang merasa malu dan menarik diri sebelum dikenai sanksi komunitas.

Maja Labo Dahu sebagai Dasar Sistem Akuntansi Berbasis Komunitas

Maja Labo Dahu sebagai dasar sistem akuntansi berbasis komunitas mencerminkan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam praktik pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya secara kolektif yang tidak semata-mata bergantung pada prosedur formal. hal tersebut dipaparkan oleh Agus alim bahwa

“Nilai *maja* (malu) dan *labo dahu* (takut) berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kuat, di mana setiap individu terdorong untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola dana bersama karena adanya tekanan

moral dari lingkungan sekitar serta kesadaran spiritual akan pertanggungjawaban akhirat”

Sistem akuntansi tidak hanya dimaknai sebagai pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai media kepercayaan dan partisipasi warga dalam menjaga integritas sosial. Misalnya, dalam praktik pengelolaan dana arisan atau kas RT, proses pencatatan sering dilakukan secara sederhana kadang hanya dengan buku tulis atau papan pengumuman—namun memiliki nilai legitimasi yang tinggi karena didukung oleh budaya malu dan rasa takut menyalahi amanah komunitas. Nilai-nilai ini menjadikan sistem akuntansi komunitas bersifat partisipatif, transparan, dan reflektif terhadap norma lokal yang berlaku, Wibowo (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas substantif dalam masyarakat lokal lebih ditentukan oleh relasi sosial, integritas moral, dan legitimasi kultural dibandingkan oleh standar teknis formal, sehingga praktik akuntansi berbasis komunitas menjadi bentuk refleksi nilai-nilai lokal yang hidup dan bermakna. lebih lanjut lagi yang dipaparkan Agusalm

“ Makna Maja Labo Dahu bukan hanya dilihat dalam satu aspek tetapi seluruh aspek jika di cermati secara mendalam pemaknaan maja labo dahu yang sejarahnya lebih berbasis pada nilai spiritual islam tetapi dalam pemaknaan nya biasa masuk dalam keseluruhan aspek tentunya hal tersebut berpotensi besar menjadi fondasi dalam pengembangan sistem akuntansi berbasis komunitas yang lebih kontekstual dan humanis.”

Dalam sistem ekonomi kolektif seperti nggampo (pertanian bersama), arisan kampung, atau koperasi lokal, akuntabilitas tidak hanya diukur dari laporan keuangan tertulis, tetapi juga dari ketulusan, kejujuran, dan kejelasan niat dari pelaku ekonomi. Pelaporan yang dilakukan dengan transparansi substantive yakni terbuka secara sosial, bermakna secara moral, dan jujur dalam penyampaian lebih dihargai daripada pelaporan teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya harus objektif dan efisien, tetapi juga harus berakar pada budaya lokal dan relasi sosial.

Akuntabilitas dalam masyarakat Bima dibentuk lebih oleh kesadaran kultural dibanding instrumen teknokratis, sehingga *Maja Labo Dahu* dapat dipandang sebagai landasan etik yang memperkuat akuntansi sosial berbasis nilai. Sebagaimana dijelaskan oleh Roberts (1991), akuntabilitas sejatinya tidak hanya dimaknai secara teknis sebagai pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan relasi, pengakuan, dan rasa tanggung jawab dalam konteks kultural yang spesifik. Dalam kerangka ini, *Maja Labo Dahu* menjadi mekanisme kontrol internal berbasis nilai, yang mampu memelihara integritas sosial tanpa ketergantungan pada standar birokratis. Selain itu, Taufik (2022) menegaskan pentingnya pendekatan akuntansi kontekstual yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem pelaporan komunitas, di mana pelaporan keuangan tidak hanya dinilai dari aspek formalitasnya, tetapi juga dari sejauh mana ia mencerminkan kearifan lokal dan legitimasi sosial. Dengan demikian, *Maja Labo Dahu* tidak hanya menjadi filosofi etis, tetapi juga sistem nilai yang relevan untuk merancang model akuntansi berbasis komunitas yang kontekstual, berkelanjutan, dan selaras dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat

Pendekatan ini mendukung gagasan akuntansi kontekstual sebagaimana dikemukakan oleh Taufik (2022) dan Triyuwono (2006), bahwa sistem akuntansi harus sensitif terhadap nilai, norma, dan ekspresi lokal. Oleh karena itu, integrasi nilai Maja Labo Dahu dalam sistem pelaporan komunitas dapat memperkuat legitimasi sosial, memperdalam kepercayaan kolektif, dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Nilai *Maja Labo Dahu*, yang mengandung prinsip malu dan takut, berperan sebagai fondasi moral dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bima. Nilai ini diinternalisasi sejak dini melalui pendidikan informal dan menjadi norma kolektif yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban ekonomi. Dalam praktiknya, akuntabilitas tidak diwujudkan melalui pelaporan formal, melainkan

melalui mekanisme sosial seperti musyawarah, keterbukaan lisan, dan sanksi moral. Rasa malu dan takut menjadi kontrol internal yang efektif, mencegah penyimpangan dan mendorong integritas. Nilai ini juga terbukti mampu membentuk sistem pelaporan berbasis komunitas yang lebih humanis dan kontekstual, di mana ketulusan dan kejujuran lebih utama daripada format teknis. Dengan demikian, *Maja Labo Dahu* menjadi dasar penting dalam merancang sistem akuntansi komunitas yang berakar pada nilai lokal, memperkuat kepercayaan sosial, dan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J., & Nahapiet, J. (1980). The roles of accounting in organizations and society. *Accounting, Organizations and Society*, 5(1), 5–27. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(80\)90017-3](https://doi.org/10.1016/0361-3682(80)90017-3)
- Cooper, D. J., & Morgan, W. (2008). Making accountability visible: The role of accounting in social movements. *Accounting, Organizations and Society*, 33(5–6), 614–634. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.01.001>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Djanggih, H. (2019). Nilai budaya *Maja Labo Dahu* sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat Bima. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 7(1), 45–57.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Prentice Hall.
- Hamid, A. (2016). Nilai-nilai lokal dalam budaya Bima: Studi tentang *Maja Labo Dahu*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 101–115.
- Kamayanti, A. (2016). *Akuntansi interpretif: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: CAPS.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- MacIntyre, A. (1984). *After virtue: A study in moral theory* (2nd ed.). University of Notre Dame Press.
- Mulawarman, A. D. (2011). *Akuntansi syariah: Teori, konsep dan perspektif*. Malang: UMM Press.
- Roberts, J. (1991). The possibilities of accountability. *Accounting, Organizations and Society*, 16(4), 355–368. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(91\)90027-C](https://doi.org/10.1016/0361-3682(91)90027-C)
- Taufik, M. (2022). Akuntansi kontekstual: Relevansi nilai lokal dalam sistem pelaporan keuangan komunitas. *Jurnal Akuntansi dan Kearifan Lokal*, 4(1), 12–25.
- Triuwono, I. (2006). *Rekonstruksi paradigma akuntansi: Menggapai akuntansi syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, M. (2020). *Etika sosial dalam budaya Mbojo: Telaah filosofis terhadap nilai Maja Labo Dahu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Manen, M. (1990). *Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy*. State University of New York Press.
- Wibowo, A. (2017). Akuntabilitas substantif dan budaya lokal. *Jurnal Etika dan Akuntansi*, 9(1), 45–60.
- Ilmiawan Mubin, Hikmah Hikmah.(2018) Makna Filosofis Maja Labo Dahu Dan Pengaruh Terhadap Karakter Masyarakat Bima Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin 1917-1951
- M,Sholihin, (2019) *Maja Labo Dahu Dari Suku Bima Untuk Seluruh Manusia Media Mahasiswa Wasila* (https://washilah.com/2019/06/maja-labo-dahu-dari-suku-bima-untuk-seluruh-manusia/?utm_source=chatgpt.com)
- Didi Haryono (2016) Makna Falsafah “Maja Labo Dahu” Dalam Culture Masyarakat Bima Mbojoklopedia https://www.mbojoklopedia.com/2016/10/makna-falsafah-maja-labo-dahu-dalam.html?utm_source=chatgpt.com